

***INFLUENCE, TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, AND COMMUNITY PARTICIPATION ON VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT (CASE STUDY IN THE VILLAGE IN NGANJUK DISTRICT, NGANJUK DISTRICT)***

**PENGARUH, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA DI KECAMATAN NGANJUK, KABUPATEN NGANJUK)**

**Marhaendra Ihza Pahlevi<sup>1</sup>, Endah Susilowati<sup>2</sup>, Astrini Aning Widoretno<sup>3</sup>**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya<sup>1,2,3</sup>

[ihzapahlevi12@gmail.com](mailto:ihzapahlevi12@gmail.com)<sup>1</sup>, [endahs.ak@upnjatim.ac.id](mailto:endahs.ak@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>,

[astrini.widoretno.ak@upnjatim.ac.id](mailto:astrini.widoretno.ak@upnjatim.ac.id)<sup>3</sup>

***ABSTRACT***

*The purpose of this study is to test and prove transparency, accountability, and community participation in the management of village fund allocations in villages in Nganjuk sub-district, Nganjuk district. The type of research used is quantitative research. The research population is village officials, BPD, and community representatives in villages in Nganjuk District, Nganjuk Regency. Sampling technique using random sampling or random sampling. The results showed that transparency, accountability, and community participation contributed to the management of village fund allocations in villages in Nganjuk sub-district, Nganjuk district. Thus, village officials in villages in Nganjuk District, are able to implement and improve the management of village fund allocations that are accountable, transparent, and participatory in accordance with applicable regulations so that they become more advanced villages and better financial management.*

***Keywords:*** *Transparency, Accountability, Society participation*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan membuktikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa di kecamatan nganjuk, kabupaten nganjuk. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah perangkat desa, BPD, dan perwakilan masyarakat pada desa di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Teknik pengambilan sampling dengan menggunakan *random sampling* atau sampling acak. Alat uji yang digunakan penelitian ini adalah SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tranparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memiliki kontribusi terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa di kecamatan nganjuk, kabupaten nganjuk. Dengan demikian, perangkat desa pada desa di Kecamatan Nganjuk, mampu menerapkan dan meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa yang akuntabel, transparansif, dan partisipatif sesuai peraturan yang berlaku sehingga menjadi desa yang lebih maju dan pengelolaan keuangan menjadi lebih baik.

**Kata kunci :** Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat.

## PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan terendah dalam struktur pemerintah Indonesia yang dihuni oleh penduduk sejak dahulu kala. Awal mulanya desa terbentuk dengan adanya aktivitas kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial, dorongan kodrat, atau sekeliling manusia, dan kepentingan yang sama (Ningsih, dkk., 2020). UU Nomor 6 Tahun 2014, memaparkan bahwa desa merupakan daerah otonom yang berarti bahwa pemerintahan yang ada di desa bersifat mandiri. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Adanya peraturan otonomi daerah, maka sebuah desa harus bisa semaksimal mungkin dalam hal mengatur tata kelola pemerintahannya serta mengelola keuangannya secara terarah agar kesejahteraan masyarakat desa berkembang.

Tata kelola keuangan desa tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa setiap desa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan terkait penggunaan keuangan desa serta melaporkannya kepada pemerintah daerah setiap satu semester sekali. Tata kelola keuangan desa yang baik dapat terwujud apabila kebutuhan akan variabel pendukung terpenuhi. Banyak variabel yang mampu mendukung pengelolaan desa supaya lebih baik dan berjalan sesuai tujuan, diantaranya adalah akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan sistem akuntansi keuangan desa.

Transparansi memiliki arti penting bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk

mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Transparansi terkait penyampaian informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat. Akuntabilitas yang baik harus terbuka terkait informasi nantinya ditampilkan melalui website, pengumuman verbal desa atau papan informasi yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat desa. Adanya akuntabilitas akan menjadi acuan pemerintah desa untuk memberikan hasil kinerja yang positif kepada masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat setiap desa diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa. Partisipasi masyarakat mempengaruhi keberhasilan suatu program pembangunan desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan tentang program pembangunan, tetapi masyarakat juga terlibat dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di lingkungan tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan (Rina, 2022) tentang Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro menyimpulkan bahwa dari segi transparansi untuk desa Mojoranu menurut masyarakat belum sepenuhnya transparan, karena belum adanya kemudahan untuk masyarakat dalam

mengakses laporan dana desa. Hal tersebut dikarenakan dari pihak perangkat desa terkait, belum update terkait laporan dana desa. Penelitian tersebut, mendukung penelitian yang dilakukan oleh Qulub (2019) tentang akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan dana desa di desa Karangnom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Menyimpulkan bahwa proses penyusunan dan pengelolaan dana desa belum sepenuhnya bisa dikatakan akuntabel dan transparan karena untuk tahap pelaksanaannya pemerintah desa kurang berkoordinasi dengan Tim Pelaksana (Timlak) dalam mengatur anggaran, untuk tahap pelaporan masih lemah dan tahap pertanggungjawaban kurang terbuka terhadap Masyarakat.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Della (2017) tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk menyimpulkan bahwa alokasi dana desa yang ada pada Desa Sugihwaras sesuai dengan peraturan yang ada. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras secara keseluruhan sudah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi. Partisipasi masyarakat Desa Sugihwaras dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang baik sudah tercapai secara maksimal. Hasil ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Ninadia (2017) tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2017(Studi Kasus Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk) menyatakan bahwa perencanaan program alokasi dana desa di Desa Banjardowo telah melaksanakan konsep partisipatif masyarakat desa yang

dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi dan akuntabilitas guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang mendapat respon atau tanggapan positif masyarakat guna peningkatan pembangunan pedesaan.

Penelitian ini dilakukan pada Desa Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Motivasi penulis mengambil tempat di Desa Begadung karena masih belum transparan terkait informasi pengelolaan dana desa. Tidak ada informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan alokasi dana desa dalam hal pembangunan desa dan masih minimnya penelitian yang dilakukan pada desa di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan studi awal kepada 30 masyarakat salah satu desa di Kecamatan Nganjuk secara acak melalui penyebaran kuesioner untuk mengetahui tingkat pemahaman akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

**Tabel 1. Persentase Hasil Penyebaran Kuesioner**

Variabel	Jumlah Masyarakat		Persentase ( % )	
	Mengetahui	Tidak Mengetahui	Mengetahui	Tidak Mengetahui
Akuntabilitas	8	22	27%	73%
Transparansi	12	18	40%	60%
Partisipasi Masyarakat	24	6	80%	20%

Sumber: Data diolah Peneliti, 2022

Dari hasil studi pendahuluan oleh peneliti melalui penyebaran kuesioner kepada 30 masyarakat desa di Desa Begadung, Kecamatan Nganjuk, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat desa di Desa Begadung,

Kecamatan Nganjuk yang belum mengetahui tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan untuk partisipasi masyarakat sudah banyak masyarakat yang mengetahui dan ikut berpartisipasi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada penelitian sebelumnya. Peran pemerintah desa sangatlah penting dalam hal pengelolaan alokasi dana desa. pemerintah desa harus bisa mempertanggungjawabkan keuangan desa sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu peran masyarakat perlu terlibat dalam seluruh kepentingan yang dimilikinya, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan menentukan kebijakan dalam pengelolaan alokasi dana desa agar pemerintah desa tidak bergantung pada pemerintahan desa saja, tetapi tidak lepas dari keterlibatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian masyarakat desa sebagai makhluk sosial diharapkan menjadi masyarakat yang berguna, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintah sehingga menciptakan pemerintahan desa yang bersifat *good governance*. Dengan latar belakang tersebut penulis ingin menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh, Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk)”.

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Hal tersebut terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan

dan pengendalian perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Panda dan Leepsa, (2017) teori agensi berfokus pada masalah yang timbul di perusahaan sebagai akibat dari adanya pemisahan kekuasaan antara prinsipal dengan agen, dan menekankan pada solusi dari masalah tersebut. Teori ini membantu dalam melaksanakan mekanisme *corporate governance* sebagai wujud kontrol pihak prinsipal terhadap agen di perusahaan

### **Pengertian Transparansi**

Transparansi yang dipaparkan oleh Sabarno, (2017) adalah satu aspek dasar untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik bagi masyarakat perlu adanya keterbukaan dan kemudahan akses serta keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan pengaruh perwujudan berbagai indikator lainnya. Menurut Iznillah, dkk., (2018) dalam penelitiannya memaparkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.

### **Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban kepada publik terhadap proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas yang baik harus terbuka terkait informasi nantinya ditampilkan melalui *website*, pengumuman verbal desa atau papan

informasi yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat desa (Mardiasmo, 2018: 27). Adanya akuntabilitas akan menjadi acuan pemerintah desa untuk memberikan hasil kinerja yang positif kepada masyarakat setempat (Sofyani & Tahar, 2021).

### **Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Menurut (Putra & Rasmini, 2019) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga mempengaruhi pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dana desa dapat menjadi kontrol kinerja pemerintah desa dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Efektivitas pengelolaan keuangan dana desa diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, penyusunan dan pengambilan kebijakan anggaran dana desa.

### **Kerangka Berpikir**

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan bahwa tahapan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan serta Pertanggungjawaban. Berdasarkan asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa dituntut menerapkan tata kelola desa yang baik atau *Good Governance* sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.

### **Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Transparansi dianggap suatu hal yang diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi transparansi yang terjadi maka cenderung semakin efektif pengelolaan dana desa. Teori keagenan menjelaskan adanya asimetri informasi, yaitu keadaan dimana *principal* tidak memperoleh informasi yang sama dengan *agent*, sehingga dengan adanya transparansi yang tinggi *principal* dapat memperoleh informasi selengkap-lengkapunya dan terjadinya asimetri informasi dapat dihindari. Transparansi yang dipaparkan (Dewi & Adi, 2019) adalah satu aspek dasar untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik bagi masyarakat perlu adanya keterbukaan dan kemudahan akses serta keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan pengaruh perwujudan berbagai indikator lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Alfiani & Estiningrum, 2021) menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh (Rijal, dkk., 2021) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

**H<sub>1</sub> : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.**

### **Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

*Agency Theory* berkaitan dengan variabel akuntabilitas, mengingat akuntabilitas merupakan bentuk

pertanggungjawaban dari *agent* (perangkat desa) atas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa kepada *principal* (masyarakat desa). Dengan demikian semakin baik akuntabilitas atas suatu kegiatan maka cenderung semakin baik pengelolaan dana desa yang terjadi. Akuntabilitas berperan penting dalam Pengelolaan Dana Desa karena maraknya penyalahgunaan dana desa yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Bastian, 2010).

Penelitian yang dilakukan (Alfiani & Estiningrum, 2021) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Demikian dengan penelitian yang dilakukan (Putra & Rasmini, 2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa, dan penelitian yang dilakukan (Sugiharti & Hariani, 2021) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

**H<sub>2</sub> : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.**

**Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pengaruh dari partisipasi yang dilakukan masyarakat sebagai suatu hal dalam penilaian *principal* pada kinerja agen, jika partisipasi masyarakat tinggi

maka efektivitas pengelolaan dana desa juga semakin tinggi. Dimana partisipasi masyarakat adalah suatu cara dalam meningkatkan akuntabilitas, dengan itu masyarakat harus ikut dalam pengelolaan agar masyarakat percaya terhadap pemerintah untuk mengelola dana desanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari et al., 2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Demikian dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Gayatri, 2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

**H<sub>3</sub> : Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.**

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Objek dalam penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa oleh BPD, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat di desa kecamatan nganjuk, kabupaten nganjuk. Populasi penelitian ini berjumlah 15 desa/kelurahan di nganjuk, kabupaten nganjuk. Terdiri dari 3 perangkat desa, 2 BPD, dan 1 perwakilan masyarakat. Dengan jumlah populasi 90 orang pada desa di kecamatan nganjuk, kabupaten

nganjuk. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling acak atau *random sampling*, dimana setiap anggota populasi memiliki peluang yang diketahui dan peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel dalam penelitian. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus *slovin*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui kuesioner atau angket kepada responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan membagikan kuesioner secara langsung kepada responden yaitu perangkat desa, BPD dan perwakilan masyarakat pada desa di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Kuesioner yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini, sejumlah 74 responden dari perangkat desa, BPD, dan perwakilan masyarakat pada desa di Kecamatan Nganjuk.

### Uji Hipotesis

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Pengolahan data analisis regresi linear berganda ini dilaksanakan dengan menggunakan program SPSS V26. Hasil yang diperoleh dari proses penghitungan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Uji Hipotesis**

Model	Coefficients <sup>a</sup>		t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
	B	Beta		
1 (Constant)	15.473		5.734	.000
Transparansi (X <sub>1</sub> )	.355	.088	.403	4.018
Akuntabilitas (X <sub>2</sub> )	.204	.087	.247	2.350
Partisipasi Masyarakat (X <sub>3</sub> )	.171	.087	.196	1.972

a. Dependent Variable: Total\_Y

Sumber : data hasil olahan melalui SPSS 26 *for windows*

Dari tabel hasil analisis regresi linear berganda di atas, diperoleh koefisien variabel bebas X<sub>1</sub> (transparansi)

sebesar 0,355, koefisien variabel bebas X<sub>2</sub> (akuntabilitas) sebesar 0,204, dan koefisien variabel bebas X<sub>3</sub> (partisipasi masyarakat) adalah sebesar 0,171. Oleh karena itu, persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 15,473 + 0,355X_1 + 0,204X_2 + 0,171X_3 + e$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Koefisien transparansi sebesar 0,355, artinya pengelolaan alokasi dana desa akan meningkat untuk setiap tambahan X<sub>1</sub> (transparansi). Jadi apabila transparansi mengalami peningkatan, maka pengelolaan alokasi dana desa akan meningkat sebesar 0,355 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
2. Koefisien akuntabilitas sebesar 0,204, artinya pengelolaan alokasi dana desa akan meningkat untuk setiap tambahan X<sub>2</sub> (akuntabilitas). Jadi apabila akuntabilitas mengalami peningkatan, maka pengelolaan alokasi dana desa akan meningkat sebesar 0,204 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
3. Koefisien partisipasi masyarakat sebesar 0,171, artinya pengelolaan alokasi dana desa akan meningkat untuk setiap tambahan X<sub>3</sub> (partisipasi masyarakat). Jadi apabila partisipasi masyarakat mengalami peningkatan, maka pengelolaan alokasi dana desa akan meningkat sebesar 0,171 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

### Uji t

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa uji t terhadap variabel transparansi (X<sub>1</sub>) diketahui nilai signifikansi (Sig) adalah sebesar 0,022 < 0,05, artinya, ada pengaruh signifikan

transparansi ( $X_1$ ) terhadap pengelolaan alokasi dana desa ( $Y$ ). Variabel akuntabilitas ( $X_2$ ) diketahui nilai signifikansi (Sig) adalah sebesar  $0,000 < 0,05$ , artinya, ada pengaruh signifikan akuntabilitas ( $X_2$ ) terhadap pengelolaan alokasi dana desa ( $Y$ ). Variabel partisipasi masyarakat ( $X_3$ ) diketahui nilai signifikansi (Sig) adalah sebesar  $0,043 < 0,05$ , artinya, ada pengaruh signifikan partisipasi masyarakat ( $X_3$ ) terhadap pengelolaan alokasi dana desa ( $Y$ ).

### Uji Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ )

Hasil nilai adjusted R – square dari regresi digunakan untuk mengetahui besarnya variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel – variabel bebasnya.

**Tabel 3. Uji Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.649 <sup>a</sup>	.421	.396	1.627

Sumber : data hasil olahan melalui SPSS 26 for windows

Tabel 3 menunjukkan nilai adjusted  $R^2$  sebesar 0,396 atau 39,6%, yang berarti variabel Transparansi ( $X_1$ ), Akuntabilitas ( $X_2$ ), Partisipasi Masyarakat ( $X_3$ ) mampu menjelaskan perubahan variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( $Y$ ) sebesar 39,6% dan sisanya sebesar 60,4% dijelaskan variabel lain di luar model. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan untuk teknis analisis ini cocok.

Dalam rangka memberikan informasi mengenai pengaruh transparansi ( $X_1$ ), akuntabilitas ( $X_2$ ), dan partisipasi masyarakat ( $X_3$ ) terhadap pengelolaan alokasi dana desa ( $Y$ ), maka peneliti telah melaksanakan penelitian tersebut dengan 74 responden.

Berdasarkan data yang telah diolah oleh peneliti menggunakan bantuan program SPSS versi 26, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Pengaruh transparansi ( $X_1$ ) terhadap pengelolaan alokasi dana desa ( $Y$ ) pada desa di kecamatan nganjuk, kabupaten nganjuk. Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa merupakan hal penting. Pemerintah desa harus menyediakan informasi secara lengkap dan transparan mengenai penggunaan alokasi dana desa, seperti pavingisasi, pembangunan saluran irigasi dan perbaikan jalan, agar pengelolaan keuangan menjadi baik.

Dengan adanya keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, maka program pembangunan desa dapat tercapai. Hal tersebut didukung dengan adanya usulan atau ide yang disampaikan oleh masyarakat. Sehingga usulan dari masyarakat tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah desa dalam bentuk program. Dimana program tersebut dibiayai oleh dana desa.

Pengaruh akuntabilitas ( $X_2$ ) terhadap pengelolaan alokasi dana desa ( $Y$ ) pada desa di kecamatan nganjuk, kabupaten nganjuk. Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Dalam melaksanakan akuntabilitas, pemerintah desa memasang spanduk pengumuman



laporan keuangan di balai desa, agar masyarakat mengetahui kondisi keuangan desa sesuai UU Desa No.06 Tahun 2014.

Penelitian yang dilakukan oleh (Alfiani & Estiningrum, 2021) menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Rijal, dkk., (2021) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Akuntabilitas berperan penting dalam Pengelolaan Dana Desa karena maraknya penyalahgunaan dana desa yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Penelitian yang dilakukan (Alfiani & Estiningrum, 2021) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Demikian dengan penelitian yang dilakukan (Putra & Rasmini, 2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa, dan penelitian yang dilakukan (Sugiharti & Hariani, 2021) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Pengaruh partisipasi masyarakat ( $X_3$ ) terhadap pengelolan alokasi dana desa ( $Y$ ) pada desa di kecamatan nganjuk, kabupaten nganjuk. Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah

dilaksanakan, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan baik apabila setiap kegiatan melibatkan masyarakat desa secara langsung, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses pengelolaan alokasi dana desa karena program alokasi dana desa ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Bentuk dari partisipasi masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa ini seperti dikutsertakannya masyarakat dalam perencanaan desa, diikutsertakannya masyarakat dalam sosialisasi yang diselenggarakan oleh desa, diikutsertakannya masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian desa, serta gotong royong, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari et al., 2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Demikian dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Gayatri, 2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Bahwa penelitian, maka disimpulkan transparansi memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Transparansi pada pengelolaan dana desa ini telah dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa pada desa di Kecamatan Nganjuk dengan memberikan

informasi-informasi mengenai penggunaan alokasi dana desa, seperti pavingisasi, pembangunan saluran irigasi dan perbaikan jalan yang dibutuhkan oleh pihak pengelola alokasi dana desa oleh masyarakat pada desa di Kecamatan Nganjuk baik yang berhubungan dengan rincian laporan keuangan dan non keuangan. Akuntabilitas memberikan kontribusi terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Akuntabilitas pada pengelolaan alokasi dana desa sudah dilaksanakan dengan baik dimana setiap penggunaan alokasi dana desa sudah disertai dengan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak pengelola alokasi dana desa pada desa di Kecamatan Nganjuk. Pelaporan tersebut berisi laporan keuangan mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum pedesaan yang berupa perbaikan jalan, pavingisasi, saluran irigasi dan sebagainya. Partisipasi masyarakat memberikan kontribusi terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Partisipasi masyarakat pada desa di Kecamatan Nganjuk dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat pada musyawarah desa dan juga melibatkan masyarakat pada program-program yang dilaksanakan desa. Bentuk dari partisipasi masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa ini seperti dikutsertakannya masyarakat dalam perencanaan desa, diikutsertakannya masyarakat dalam sosialisasi yang diselenggarakan oleh desa, diikutsertakannya masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian desa, serta gotong-royong, dan sebagainya.

### Saran

1. Perangkat desa pada desa di Kecamatan Nganjuk, diharapkan tetap menerapkan dan meningkatkan pengelolaan alokasi dana yang akuntabel, transparansif, dan partisipatif sesuai peraturan yang berlaku agar menjadi desa yang lebih maju dan pengelolaan keuangan menjadi lebih baik.
2. Variabel dalam penelitian ini juga dapat diperluas, sehingga pembahasan dalam penelitian tidak hanya mengenai pengelolaan alokasi dana desa, akan tetapi peneliti bisa menggunakan variabel-variabel lain seperti prinsip good governance yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 222–229. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU>
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269–1298. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan

- Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). Yogyakarta: Andi.
- Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan Di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517–3532. Retrieved from <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/30>
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10 (1), 74–95
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2014).
- Permatasari, I., Susilowati, E., & Tannar, O. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5(2), 400–411. Retrieved from <https://www.detik.com>
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132–158. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Rijal, M. S., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governace. *E-JURNAL AKUNTANSI (E-JA)*, 31(12), 3301–3313. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v>
- Sabarno, H. (2017). Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Dan Pengelolaan Pulau-Pulau Indonesia Di Wilayah Perbatasan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 33(1), 67–75.
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10–25. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.